

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Kencana.
- 2019. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ruslan. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Agus Pandoman. 2017. *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum* Edisi II Cet.5. JPT. Raja Jakarta: Grafindo Persada.
- Budi Untung. 2015. *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Diana Hakim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Tangerang: Ghalia Indonesia.
- Doddy Radjasa Waluyo. 2004. *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris. Media Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E.Y. Kanter. 2001. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Storia Grafika.
- E Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*. Yogyakarta: Kanisius.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 5. Jakarta : Airlangga.
- 2001. *Peraturan Jabatan Notaris*. cet.iii. Jakarta: Erlangga.
- Hans Kelsen. 2010. *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi. *General Theory Of Law and State. Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- 2005. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Renvoi. No.28. Th. III.Jakarta: Kanisius
- , 2006. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Jakarta: Kanisius
- Harlien Budiono. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Indroharto. 2014. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardani.2017. *Etika Profesi Hukum*.Rajawali Press. Depok.
- Muhammad Hasbi.2018. *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*.Disertasi. program pascasarjana Padang: Universitas Andalas.
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni.
- Muclis Fatahna dan Joko Purwanto. 2003. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*.Jakarta: Watampone Press.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Philipus M.Hadjod 1986. *Makalah Tentang Wewenang*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- 2005.*Hukum Administrasi Negara*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Raisul Mutaqin. 2006. *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*. Bandung: Kanisius
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Sugondo Notodisoerjo. 2003. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Ridwan H. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SatjiptoRaharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1995.*Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*.Jakarta: Remadja KaryaCV.

- . 2008. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (suatu Pengantar)*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sjaifurrachmandan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro. Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sofwan. Sri Soedewi Masyohen. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. R. dan Tjitrosudibio. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim H. S. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: RajawaliPers.
- dan erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Shinta Agustina. 2014. *Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Themis Book.
- Sudikno Mertokusumo 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sulhan, dkk. 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhardana. 2002. *Hukum Perdata I (Buku Panduan Mahasiswa)*. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Tedjosaputro Liliana. 2004. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahyu Sasongko. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wuisman. JJ. Penyunting M. Hisyam.2006. Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Jilid I.Jakarta:UI Press.

B. Jurnal

Dina Shabrina, Azmi Fendri, Frenadin Adegustara. 2020. “Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum oleh Notaris di Kota Padang.” Jurnal Yusdisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 11 No. 2. Desember 2020.

Didit Wadio dan Lathifah Hanim. 2018. “Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman.” Jurnal Akta Vol. 5 No. 1 Maret 2018.

Oddy Marsa JP. 2018. “Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)”. jurnalCepalo Magister Hukum Unila. Vol. 2.No.1.2018.

Ria Trisnomurti, 2017. “Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris”. Jurnal Notariil Vol.2 No. 2 November 2017.

Rineke Sara. 2012 “Peran Majelis Pengawas Daerah Kota Bekasi dalam Sidang Pemeriksaan Notaris Atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.” Jurnal Constitutum Vol. 12. No. 1 Oktober 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

D. Website

Muhammad Haris. *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Neliti. <https://www.neliti.com/publications/30013/pengawasan-majelis-pengawas-daerah-terhadap-notaris-setelah-berlakunya-undang-undang-2014> (Diakses tanggal 21 Maret 2019).

